

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 12, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jimly Asshidiqie, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sinar Grafika, Bandung.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan yang disunting oleh Philipus M. Hadjon*, Yuridika, Surabaya.
- Rosidi Ranggwidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Sirojul Munir, 2003, *Hukum Daerah di Indonesia, Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Larangan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2020

C. Sumber Lain

Adam Amin Bahar. 2012. "*Pengertian Pemerintahan*". [Online]. Tersedia: blogspot.com

Ari Zulfa, "*Pemerintahan daerah-di-indonesia*". [Online]. Tersedia: <https://id.wikipedia.org/wiki/>

Ditjen Sdppi, 2016, "*Data dan Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*". [Online]. Tersedia: <https://statistik.kominfo.go.id>, Di akses pada tanggal 16 Mei 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas: Infografik_BTS_\(Base_Transceiver_Station\)_di_Indonesia.jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Infografik_BTS_(Base_Transceiver_Station)_di_Indonesia.jpg)